

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2016 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LAKjiP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2016 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LkjiP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar).

Selain itu, dokumen LKJIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKJIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dan visi – misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Demikian, semoga dokumen LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amiin.

Karanganyar, 3 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR

Dra. ANY INDRI HASTUTI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198503 2 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKJIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2019 secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2017, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, wajib menyusun LKJIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Karanganyar adalah **“Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang, Kesetaraan Gender dan Perlindungan perempuan dan Anak”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar melaksanakan program dan kegiatan. Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja / Perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk mencapai Sasaran Strategis, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assesment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari Sasaran yang telah ditetapkan adalah berhasil mencapai nilai kinerja, Sehingga dikategorikan baik.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian/Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Organisasi Perangkat Daerah**, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKJIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKJIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKJIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu wujud transparansi penyelenggaraan pemerintah. Penyusunan LKIP oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program/kegiatan dan seberapa besar sasaran strategis dapat diwujudkan. Pembagian urusan sebagai alternatif dalam memudahkan pemahaman yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan adalah upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan yang ditandai dengan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender, upaya pemenuhan hak-hak anak sedangkan perlindungan perempuan dan anak terdiri upaya preventif dan rehabilitasi kasus kekerasan melalui pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan urusan keluarga berencana menitikberatkan pada kesehatan reproduksi melalui pendekatan pendewasaan usia perkawinan dan keluarga berencana itu sendiri melalui pendekatan PUS sebagai peserta aktif keluarga berencana.

Tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan 5 (lima) tahun yang tertuan pada Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yaitu :

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
- b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tujuan penyusunan LKJIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKJIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB);
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) pada tahun berikutnya.
4. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan isu-isu strategis, visi dan misi pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.
5. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.
6. Bahan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Akuntabilitas kinerja yang berkualitas merupakan penganan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2 Gambaran Organisasi

a. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

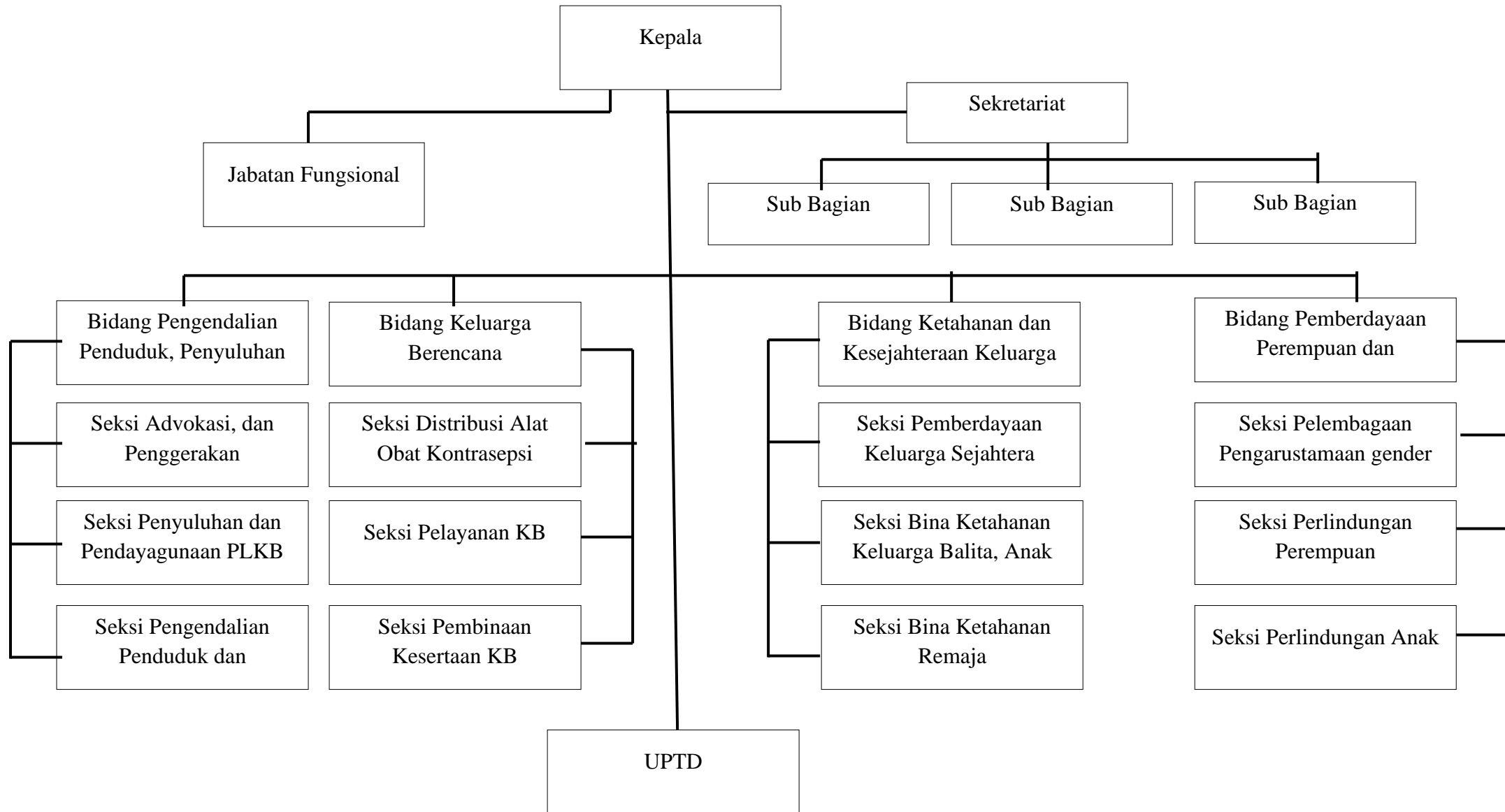
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Pemberntukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16) adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - 5) Pelaksanaan fungsi Kesekretariatan;
 - 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



d. Sususnan Kepegawaian

Tabel.
Jumlah Pegawai Per Desember 2019
Berdasarkan Golongan dan Jabatan

GOLONGAN	FUNGSIONAL				STRUKTURAL			STAF	TOTAL
	1	2	3	4	Esl. II	Esl. III	Esl. IV		
Gol IV/e									0
Gol IV/d									0
Gol IV/c					1				1
Gol IV/b									
Gol IV/a							7		7
Jumlah Gol IV					1		7		8
Gol III/d							2	1	3
Gol III/c								6	6
Gol III/b								2	2
Gol III/a								2	2
CPNS Gol III/a									
Jumlah Gol III							2	11	13
Gol II/d									
Gol II/c								1	1
Gol II/b									
Gol II/a									
Jumlah Gol II									
Gol I/d									
Gol I/c									
Gol I/b									
Gol I/a									
Jumlah Gol I									
Jumlah Total					1		9	12	22

1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2018-2023, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), yaitu :

1. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas;
2. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
4. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi;
5. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana;
6. Mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia potensial, sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut;
7. Menyediakan data dan informasi keluarga;

8. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang pembangunan;
9. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
10. Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
11. Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
12. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan;
13. Mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana dan akuntabel;
14. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang KB;
2. Belum semua OPD menganggap pengarusutamaan gender (PUG) sebagai isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan;
3. Kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi advokasi, fasilitas, mediasi, koordinasi serta kapasitas SDM untuk menyusun perencanaan analisis dan manajemen PUG masih terbatas;
4. Rendahnya akses perempuan pada sumber daya ekonomi (modal, teknologi, informasi, pelatihan penguatan jaringan/kelembagaan dll) menyebabkan sektor perekonomian yang dikelola perempuan tertinggal;
5. Masih tingginya tindak kekerasan perempuan dan anak.

Arah kebijakan dan strategi dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana ke depan adalah;

1. Penguatan dan pepaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB;
3. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional Efektif dan Efisien (REE);
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB;

9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari terkait pengembangan Program KKBPK.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dibuatnya lapran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini meliputi :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang sistem perencanaan nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kKota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Kesetaraan Gender Perlindungan perempuan dan Anak”.

Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan lain-lain.

Perwujudan dari komitmen tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar selama lima tahun kedepan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat , meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Meningkatkan SDM dan penyeteraan gender di semua bidang pembangunan.
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana.
4. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
5. Perlindungan terhadap kekerasan bagi perempuan dan anak.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Meningkatnya kesetaraan Keluarga Berencana
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Untuk mencapai misi tersebut DP3APPKB menetapkan dua tujuan strategis yang diuraikan dalam 4 Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut :

Tujuan Strategis I

Mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana.

Berbagai tantangan pelayanan KB yang masih dihadapi adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah, didukung tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang sesuai standar, serta penguatan manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi. Untuk itu, DP3APPKB berupaya menguatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas. Dalam rangka pencapaian tujuan strategis ini, DP3APPKB telah menetapkan dua sasaran strategis, yaitu :

a. Meningkatnya kesetaraan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan modal pembangunan. Dalam pembangunan, penduduk dapat menjadi aset ataupun beban. Jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi aset jika disertai dengan kualitas sumber daya yang baik. Di sisi lain, jumlah penduduk yang terlampaui sedikit dapat menjadi masalah bagi keberlangsungan jumlah penduduk di masa depan.

Sejak pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) pada awal tahun 1970-an, angka kelahiran mengalami penurunan yang sangat berarti. Keberhasilan ini salah satunya didukung oleh keberhasilan peningkatan pemakaian alat dan obat kontrasepsi.

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan.

Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sasaran strategis ini, BKKBN berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi guna mengendalikan angka kelahiran.

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan.

Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sasaran strategis ini, DP3APPKB berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi guna mengendalikan angka kelahiran.

Oleh karena itu, peningkatan pengendalian penduduk melalui program KB MKJP menjadi sasaran strategis yang harus diperhatikan dari waktu ke waktu. Peningkatan peserta KB baru MKJP merupakan salah satu komponen pengendalian penduduk yang mempunyai resiko kegagalan yang rendah.

b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Untuk menghadapi tantangan kedepan yang semakin berat setiap keluarga harus memiliki ketahanan yang kokoh. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sedangkan Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Tujuan dari Program pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga

melalui kegiatan-kegiatan Kelompok seperti Pembinaan Keluarga Balita dan Anak, Pembinaan Ketahanan Remaja, Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Tujuan Strategis II

Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	77	
2	Kabupaten Layak Anak	74,52	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	12	
4	Keterwakilan perempuan dalam legislatif	8.37 per 100.000	
5	Presentase peserta KB baru MKJP	6,5	
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75.00	
7	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	21.64	

Keterangan : * semakin menurun semakin baik

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan prespektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam tahapan perencanaan kinerja, langkah awal yang dilakukan adalah perumusan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Target kinerja DP3APPKB tahun 2019 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dengan memperhatikan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan akuntabel serta berorientasi hasil maka dilakukan penetapan (RKT) yang merupakan penjabaran atas pelaksanaan dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian renstra.

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja	Target
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	77
2	Kabupaten Layak Anak	74,52
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	12
4	Keterwakilan perempuan dalam legislative	8.37 per 100.000
5	Prosentase peserta KB baru MKJP	6,5
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75.00
7	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	21.64

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75% = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55% = Kurang (D)

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

No	Indikator Kinerja	
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	
2	Kabupaten Layak Anak	Jumlah indikator KLA tercapai
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan/jumlah perempuan dan anak X 100%
4	Keterwakilan perempuan dalam legislative	Jumlah perempuan di legislative
5	Prosentase peserta KB baru MKJP	Peserta KB aktif tahun lalu + peserta KB baru
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	CPR = Jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang sedang berKB x 100
7	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Pra Ks, ks, ks1, ks2 X 100%

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN Th. 2017	CAPAIAN SASARAN Th. 2018	TAHUN 2019		CAPAIAN SASARAN Th. 2019	TARGET AKHIR RPJMD (Tahun 2023)	CAPAIAN SASARAN Th. 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,27	74,31	74,52	80,51	108,03	74,95	108,03
Kabupaten Layak Anak	370	732,11	742	745	100,40	780	100,40
Rata-rata presentase (%) capaian kinerja					158,23 %		158,23 %

Analisis :

- **IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Apabila dilihat dari komponen pendukung IPG, diketahui bahwa adanya penurunan gap antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi yang ditunjukkan pada komponen pengeluaran per kapita. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses ekonomi bagi perempuan mengalami peningkatan. Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

- **Kabupaten Layak Anak**

Secara umum capaian pemenuhan hak anak ditunjukkan dalam pemenuhan 24 indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terealisasi melalui perolehan penghargaan KLA Upaya peningkatan yang lebih keras lagi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Karanganyar yang memerlukan dukungan lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pada Tahun 2019 kabupaten Karanganyar menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama sebagai komitmen pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kedepan perlu upaya signifikan antara lain advokasi dalam percepatan capaian indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengembangan Desa/Kelurahan layak anak, peningkatan partisipasi anak dalam proses pembangunan, advokasi legalitas kelahiran anak, peningkatan pemahaman hak anak bagi tenaga layanan, dunia usaha dan stakeholder, serta advokasi penganggaran responsif hak anak di OPD kabupaten.

A. Sasaran 1 : Meningkatkan peserta KB Baru MKJP

IKU 1 – Presentase peserta KB Baru MKJP

IKU 1 – Presentase peserta KB Baru MKJP

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Sasaran strategis (SS) ini dimaksudkan agar DP3APPKB dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Karanganyar karena laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan kuantitas penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat akan menyebabkan pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar penduduk seperti sandang, pangan, papan dan pekerjaan serta pendapatan rakyat. Tingkat pendapatan rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan negara. Oleh karenanya, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tidak membahayakan kemajuan dan kesejahteraan.

Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam Program KKBPK untuk pengendalian angka kelahiran dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Di dalam pelaksanaannya diupayakan agar semua metode dan alat kontrasepsi yang disediakan dan ditawarkan kepada masyarakat memberikan manfaat optimal dengan meminimalkan efek samping maupun keluhan yang ditimbulkan.

Metode kontrasepsi menurut jangka waktu pemakaiannya dibagi atas dua kelompok, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan metode kontrasepsi jangka pendek (Non-MKJP). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang adalah kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari 2 tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin tambah anak lagi. Jenis metode yang termasuk ke dalam MKJP adalah kontrasepsi mantap pria dan wanita (tubektomi dan vasektomi), Implant dan IUD (Intra Uterine Device).

Pemantauan terhadap pelayanan kontrasepsi mutlak diperlukan terutama capaian terhadap peserta KB aktif. Hal ini karena peserta KB aktif memiliki kontribusi besar dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Penggunaan kontrasepsi jangka panjang secara langsung akan berdampak pada penurunan angka kelahiran. Pemerintah melalui DP3APPKB menekankan penggunaan MKJP bagi pasangan usia subur (PUS) untuk mengatur kelahiran maupun menghentikan kehamilan.

Pencapaian yang baik ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang tetap mengarahkan kebijakan pada penggunaan kontrasepsi MKJP yang lebih menyehatkan, diantaranya untuk meminimalkan angka drop-out peserta KB. Kebijakan yang dikembangkan pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan KB MKJP mencakup aspek pelayanan dan aspek penggerakan. Aspek pelayanan difokuskan pada penungkatan kualitas pelayanan melalui penyediaan alat kontrasepsi MKJP, penyediaan sarana pendukung pelayanan KB MKJP, peningkatan kompetensi provider, monitoring dan evaluasi serta peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan. Aspek penggerakan difokuskan pada peningkatan KIE dan promosi KB MKJP, promosi tempat pelayanan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU ini. Hal ini dikarenakan pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang menghadapi banyak kendala yaitu :

- a. Akses bagi PUS untuk mendapat pelayanan kontrasepsi jangka panjang sangat terbatas diakrenakan wilayah calon akseptor berada yang tidak terjangkau oleh sarana pelayanan medis maupun dikarenakan sarana yang tersedia tidak mendukung pelaksanaan MKJP;
- b. Masalah teknis seperti dokter dan bidan yang ditempatkan di daerah belum memiliki keahlian dalam pemasangan alat kontrasepsi MKJP;

- c. Kurangnya pengetahuan PUS mengenai alat kontrasepsi sehingga masyarakat enggan menggunakan MKJP. Mereka lebih memilih menggunakan pil atau suntuk KB karena dianggap lebih praktis.

Berdasarkan hasil ini, DP3APPKB akan melakukan upaya-upaya perbaikan di periode mendatang, antara lain :

1. Meningkatkan akses pelayanan KB berkualitas, khususnya di daerah Giciltas melalui Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN);
2. Memperkuat jejaring kemitraan dalam pelayanan KB berkualitas dengan kesepakatan, penggerakan, pemberdayaan fasilitas pelayanan yang ada di mitra, seperti, TNI, POLRI, Perusahaan;
3. Meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan KB melalui pelatihan teknis medis;
4. Penguatan dukungan biaya pra pelayanan (penggerakan lapangan) khusus untuk pelayanan MKJP;
5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PUS melalui konseling KB;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan KB melalui pelatihan KIP konseling dengan menggunakan Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK);

Sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja sasaran banyaknya peserta KB baru selama tahun 2017 Per mixkontrasepsi.

Peran DP3APPKB dalam peningkatan peserta KB Baru lebih berfokus pada pengendalian tingkat kelahiran. Dalam pengendalian kelahiran, DP3APPKB telah melakukan berbagai upaya, melalui :

1. Promosi Peningkatan Usia Perkawinan (PUP) melalui program GenRe;
2. Peningkatan pelayanan KB berkualitas melalui:
 - a. Kompetensi tenaga pelayanan KB;
 - b. Pelayanan KB melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
3. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi;
4. Advokasi tentang pembangunan berwawasan kependudukan bagi pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah;
5. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan.

DP3APPKB akan berupaya meningkatkan pencapaian IKU melalui :

1. Peningkatan akses pelayanan KB di daerah, dengan promosi program Kampung KB. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis. Melalui Kampung KB, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara dan sinergitas antara program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas PKB/PLKB dalam menyediakan informasi program KKBPK;
3. Menurunkan tingkat putus pakai melalui ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB yang berkualitas, peningkatan informasi dan penggunaan MKJP terutama bagi PUS muda paritas rendah;
4. Pembinaan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi melalui Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, BKR dan BKL serta UPPKS;

Sasaran Strategis ini dimaksudkan agar DP3APPKB dapat menurunkan angka kelahiran total (TFR). Jumlah penduduk besar dengan laju pertumbuhan dan jumlah penambahan penduduk masih tinggi walaupun cenderung menurun. Tantangan bagi DP3APPKB adalah mengendalikan TFR yang merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan jumlah penambahan penduduk.

Sasaran strategis 2 diukur melalui indikator kinerja sasaran :

IKU 2 – Presentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan TFR adalah peningkatan CPR. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR adalah presentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{CPR} = \text{Jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang sedang berKB} \times 100$$

Berdasarkan hasil ini, DP3APPKB akan melakukan upaya-upaya perbaikan di periode mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kesertaan KB pasca persalinan dan pasca keguguran;
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan KB dalam memberikan pelayanan KB yang berkualitas, melalui pelatihan medis pelayanan KB;
3. Meningkatkan pembinaan kesertaan ber-KB melalui kelompok sasaran dan fasilitas kesehatan;
4. Meningkatkan kesertaan ber-KB melalui penggerakan dalam pelayanan KB;
5. Mensosialisasikan pembiayaan pelayanan KB melalui BPJS.

IKU 3 – Prosentase penurunan keluarga pra sejahtera

Sasaran strategis 4 diukur melalui indikator kinerja sasaran;

Penurunan Jumlah Pra Ks, ks,ks1,ks2X100%

IKU 4 – Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak diukur dengan Kasus kekerasan/jumlah perempuan dan anak X 100%

IKU 5 = Keterwakilan perempuan dalam legislatif Jumlah perempuan di legislatif

IKU 6 = Kabupaten Layak Anak diukur dengan Jumlah indikator KLA tercapai

IKU 7 – IDG (Index Pemberdayaan Gender)

Beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan pencapaian IKU adalah :

1. Pengembangan kebijakan, strategi, pedoman dan grand design Generasi Berencana (GenRe);
2. Pengembangan kualitas program GenRe bersama mitra kerja dan pemangku kepentingan;
3. Pengembangan dan pembinaan kelompok PIK R/M jalur pendidikan dan masyarakat dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan;
4. Pembinaan peningkatan kualitas Bina Ketahanan Remaja (BKR);
5. Pengembangan dan Pembinaan PUS anggota kelompok BKR dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan;

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan Angka Kelahiran pada Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 Tahun) adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran

remaja mengenai kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, menghindari seks pranikah dan narkoba dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, sehingga DP3APPKB akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan sosialisasi program Generasi Berencana (GenRe) kepada remaja melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa baik cetak maupun elektronik, media sosial dan komunitas;
2. Substansi program GenRe akan difokuskan pada kualitas pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan, menghindari seks pranikah dan narkoba;
3. Peningkatan sosialisasi dan KIE GenRe kepada remaja terutama tentang perencanaan usia menikah yang matang, yaitu dari aspek kesehatan, kejiwaan, sosial, ekonomi melalui berbagai media dan forum di masyarakat.
4. Sasaran kegiatan ditujukan pada remaja usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) serta keluarga yang memiliki remaja melalui Bina Ketahanan Remaja (BKR);
5. Khusus pada PUS muda usia resiko tinggi hamil dan melahirkan, perlu pemberian KIE dan pelayanan KB, agar mereka mau ber-KB untuk tujuan penundaan mempunyai anak pertama hingga mereka memasuki usia reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan.

Kinerja adalah hasil dari program/kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur.

Capaian kinerja tahun 2016 seperti tabel 3.3

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Program (Hasil) DP3APPKB Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	realisasi	% capaian target
1		IDG (Index Pemberdayaan Gender)	77	80,51	104,56
2		Kabupaten Layak Anak	74,52	76	101,99
3	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	12	23	191,87
4	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Keterwakilan perempuan dalam legislatif	8.37 Per 100.000	12	100
5	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Prosentase peserta KB baru MKJP	16,5	36,56	153,58
		Angka pemakaian kontrasepsi / CPR	75.00	78,77	105,03
6	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Presentase Keluarga Pra Sejahtera	21.64	9,11	42,10

*menurun lebih bagus

B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

1. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) tahun 2019 seperti tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Realisasi BTL dan BL Anggaran APBD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019

BELANJA	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
		Rp	%	
Belanja Tidak Langsung	3.885.314.000	2.125.006.423	55	100
Belanja Langsung	8.275.282.000	5.892.753.312	71	100
Jumlah	12.160.596.000	8.017.759.735	66	100

2. Rincian realisasi anggaran Tahun 2019

Pada DPA/DPPA DP3APPKB Tahun Anggaran 2019 dengan jenis belanja langsung (BL) uraian ini hanya mencantumkan program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis dan indikator kinerja seperti pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Nama Keg			Anggaran		
				Anggaran (Rp)	Realisasi	Selisih Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
1	Gaji dan Tunjangan			2.485.314.000	1.375.542.243	1.109.771.757
2	Tambahan Penghasilan PNS			1.400.000.000	749.464.180	650.535.820
	(Kesejahteraan Pegawai)					
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			3.885.314.000	2.125.006.423	1.760.307.577
	BELANJA LANGSUNG/KEGIATAN					
	ANGGARAN BOKB & DAK FISIK 2019					
	Program Keluarga Berencana	Prevalensi kesertaan KB	100 %			
	Biaya operasional Keluarga Berencana (BOKB DAK)	Terlaksananya operasional keluarga berencana	1 tahun	4.502.517.000	2.726.281.330	1.776.235.670
	Pengadaan KIE Kit (DAK)	Terlaksananya pengadaan KIE Kit	30 paket	150.000.000	145.200.000	4.800.000
	Pengadaan Personal Komputer (DAK)	Terlaksananya pengadaan Personal komputer balai penyuluhan KB	10 unit	140.000.000	137.500.000	2.500.000
	Pelayanan KIE	Terlaksananya Pelayanan KIE	22.150 PB	11.360.000	10.820.000	540.000
	Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT-	Terlaksananya pengadaan tempat penyimpanan KIT/Alat	20 unit	100.000.000	98.850.000	1.150.000

		dan obat kontrasepsi				
	P. Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)	Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor kendaraan distribusi alokon	1 mobil	409.072.000	335.471.800	73.600.200
	Pengadaan Genre KIT (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Genre KIT	10 paket	300.000.000	219.800.000	80.200.000
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan	Sinkronnya kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100 %			
	Operasional forum anak kabupaten	Terlaksananya kegiatan forum anak	25 anak	25.000.000	16.237.500	8.762.500
	Sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan	65 orang	10.000.000	9.133.000	867.000
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatkan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	100 %			
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Terfasilitasinya pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	75 orang	15.000.000	14.075.000	925.000

	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	100 %			
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terfasilitasinya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	85 orang	15.000.000	11.954.500	3.045.500
	Pengembangan dan pembinaan forum kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA)	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan FKPA	180 anak	30.000.000	23.560.000	6.440.000
	BIDANG DALDUK					
	Program pelayanan kontrasepsi	Pravelensi kesertaan KB	100 %			
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	17 kecamatan	10.000.000	210.000	9.790.000
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	100 %			
	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	Tersedianya operasional kelompok masyarakat peduli kb	1.763 orang	817.813.000	811.363.000	6.450.000
	Pengelolaan data dan informasi KB	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi KB	10 kegiatan	195.640.000	170.098.500	25.541.500

	BIDANG K-3					
	Fasilitas pelaksanaan lomba-lomba urusan-urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Terlaksananya fasilitas pelaksanaan lomba - lomba urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	160 orang	25.000.000	24.837.500	162.500
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100 %			
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	70 peserta	10.000.000	8.771.000	1.229.000
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Tercapainya program bina keluarga remaja	100 %			
	Orientasi dan bimtek pengelolaan PIK-KRR	Terlaksananya orientasi dan bintek pengelola PIK-KRR	80 peserta	40.000.000	39.995.000	5.000
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Tercapainya pembinaan tumbuh kembang anak	100 %			
	Sosialisasi dan pembinaan tumbuh kembang anak	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan tumbuh kembang anak	85 peserta	10.000.000	8.815.000	185.000

	Peningkatan Pengembangan PPPAKB	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	30 kegiatan	650.000.000	431.650.000	218.350.000
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Tercapainya bina program bina keluarga	100 %			
	Temu kader bina keluarga	Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamatan	102 orang	20.000.000	17.472.250	2.527.750
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG			8.275.282.000	5.892.753.312	2.382.528.688

ANALISA EFISIENSI DAN EFEKTIF

No	Nama Keg	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan	
1	BELANJA ASLI DAERAH						
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
1	Gaji dan Tunjangan	2.485.314.000	1.375.542.243	1.109.771.757	100	55	EFF/EFI
2	Tambahan Penghasilan PNS (Kesejahteraan Pegawai)	1.400.000.000	749.464.180	650.535.820	100	54	EFF/EFI
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.885.314.000	2.125.006.423	1.760.307.577	100	55	EFF/EFI
	BELANJA LANGSUNG / KEGIATAN						EFF/EFI
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						EFF/EFI
3	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	10.000.000	0	100	100	EFF/EFI
4	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	53.600.000	44.487.596	9.112.404	100	83	EFF/EFI
5	Penyediaan jasa kebersihan	10.000.000	9.654.500	345.500	100	97	EFF/EFI
6	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	20.000.000	0	100	100	EFF/EFI
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	9.990.000	10.000	100	99.99	EFF/EFI

8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penanganan bangunan kantor	5.000.000	4.979.600	20.400	100	99,60	EFF/EFI
9	Penyediaan bahan logistik kantor	13.486.000	13.486.000	0	100	100	
10	Penyediaan makanan dan minuman kegiatan	30.000.000	17.385.000	12.615.000	100	57	EFF/EFI
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	161.800.000	160.251.064	1.548.936	100	99	EFF/EFI
12	Penyediaan jasa keamanan kantor	54.000.000	45.500.000	8.500.000	100	84	EFF/EFI
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						EFF/EFI
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	29.780.000	220.000	100	99	EFF/EFI
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96.114.000	68.486.822	27.627.178	100	71	EFF/EFI
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	5.000.000	0	100	100	EFF/EFI
16	Penyusunan Laporan SKPD Bulanan dan Tahunan	10.000.000	7.344.500	2.655.50	100	73	EFF/EFI
17	Penyusunan Restra OPD	50.000.000	24.290.500	25.709.500	100	49	EFF/EFI
	Program Keluarga Berencana						EFF/EFI
18	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	45.000.000	-	45.000.000	100		EFF/EFI
19	Peningkatan partisipasi pria dalam program KB	184.880.000	159.022.350	25.857.650	100	86	EFF/EFI
	ANGGARAN BOKB & DAK FISIK 2019						EFF/EFI

20	Biaya operasional Keluarga Berencana (BOKB DAK)	4.502.000	2.726.281.330	1.776.235.670	100	61	EFF/EFI
21	Pengadaan KIE Kit (DAK)	150.000.000	145.200.000	4.800.000	100	97	
22	Pengadaan Personal Komputer	140.000.000	137.500.000	2.500.000	100	98	EFF/EFI
23	Pelayanan KIE	11.360.000	10.820.000	540.000	100	95	EFF/EFI
24	Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT	100.000.000	98.850.00	1.150.000	100	99	EFF/EFI
25	P. Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)	409.072.000	335.471.800	73.600.200		82	EFF/EFI
26	Pengadaan Genre KIT (DAK)	300.000.000	219.800.000	80.200.000	100	73	EFF/EFI
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan						EFF/EFI
27	Operasional forum anak kabupaten	25.000.000	16.237.500	8.762.500	100	65	EFF/EFI
28	Sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan	10.000.000	9.133.000	867.000	100	91	EFF/EFI
29	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	15.000.000	14.075.000	925.000	100	94	EFF/EFI
30	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	15.000.000	11.954.500	3.045.500	100	80	EFF/EFI
31	Pengembangan dan pembinaan forum kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA) Kelurahan/Desa dan pembinaan	30.000.000	23.560.000	6.440.000	100	79	EFF/EFI
	BIDANG DALDUK				100		EFF/EFI
32	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	10.000.000	210.000	9.790.000	100	100	EFF/EFI

33	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	817.813.000	811.363.000	6.450.000	100	99	EFF/EFI
34	Pengelolaan data dan informasi KB	195.640.000	170.098.500	25.541.500	100	87	
	BIDANG K-3				100		EFF/EFI
35	Fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba urusan-urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	25.000.000	24.8337.500	162.500	100	99	EFF/EFI
36	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	10.000.000	8.771.000	1.229.000	100	88	EFF/EFI
37	Orientasi dan bimtek pengelolaan PIK-KRR	40.000.000	39.995.000	5.000	100	100	EFF/EFI
38	Sosialisasi dan pembinaan tumbuh kembang anak	10.000.000	9.815.000	185.000	100	98	EFF/EFI
39	Peningkatan Pengembangan PPPAKB	650.000.000	431.650.000	218.350.000	100	66	EFF/EFI
40	Temu kader bina keluarga	20.000.000	17.472.250	2.527.750	100	87	EFF/EFI
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	8.275.282.000	5.892.753.312	2.382.528.688	100	71	EFF/EFI

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Realisasi kinerja merupakan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan, dan apabila dikatakan berhasil realisasi kinerja diatas 80% atau lebih dan sebaliknya apabila realisasi kinerja dibawah 80% maka kategorinya tidak berhasil (Permenpan-RB Tahun 2017 tentang penyusunan LKJIP). Realisasi kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	realisasi	% capaian target
1		IDG (Index Pemberdayaan Gender)	77	80,51	104,56
2		Kabupaten Layak Anak	74,52	76	101,99
3	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	12	23	191,87
4	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Keterwakilan perempuan dalam legislatif	8.37 Per 100.000	12	100
5	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Prosentase peserta KB baru MKJP	16,5	36,56	153,58
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75.00	78,77	105,03
6	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Peresentase Keluarga Pra Sejahtera	21.64	9,11*	42,10

Apabila dikaitkan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, kami telah berupaya seluruh kegiatan telah diupayakan untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan,

Namun kontribusi kinerja tersebut masih perlu di perhitungkan kembali mengingat bahwa sasaran yang akan dicapai tersebut tidak hanya dengan satu kebijakan tetapi perlu mendapat dukungan kebijakan dari Dinas/Instansi lain yang terkait.

Meskipun tingkat capaian kinerja kegiatan maupun sasaran dari program dan kegiatan dapat di katakan berhasil/baik, namun masih perlu di upayakan peningkatan karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang, berikut ini beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis atau hasil yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Semakin bertambahnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan menjadi peserta KB yang gratis tapi berkualitas.
2. Terbatasnya Pendidikan PPKBD / Sub PPKBD / Kader KB tingkat RT.
3. Kasus kekerasan semakin meningkat.

Kendala/permasalahan tersebut diusahakan untuk dapat diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya dengan upaya :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Peningkatan frekuensi kegiatan advokasi dan KIE Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bagi semua lapisan masyarakat.
3. Mendekatkan tempat pelayanan dengan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi wilayah.
4. Mengaktifkan kegiatan Pusat Konsultasi Remaja.
5. Peningkatan kualitas SDM dengan cara pelatihan bagi petugas pengelola dan pelaksana Program Pemberdayaan Perempuan.

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- B. Piagam Penghargaan
- C. Rencana Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Rencana Kinerja Tahunan
- F. Perjanjian Kinerja
- G. Pengukuran Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III DP3APPKB KARANGANYAR

Jabatan : Sekretaris Dinas

- a. Tugas : Merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;
- e. Mengkoordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;
- f. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- g. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SEUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Meningkatnya disiplin aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Meningkatnya pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

Jabatan : Kabid Keluarga Berencana

- a. Tugas : merumuskan program kegiatan Bidang Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinasnya secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja optimal;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- f. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- g. Melaksanakan pelayanan KB di Kabupaten;
- h. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- j. Melaksanakan pengayoman peserta KB dan rujukan peserta KB;
- k. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- l. Melaksanakan koordinasi bidang KB;
- m. Membuat laporan kegiatan KB;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan jumlah peserta KB MKJP	Persentase Peserta KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah Peserta MKJP}}{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}} \times 100\%$	Laporan F/ 1 Dal
Menurunkan persentase cakupan kebutuhan pasangan usia subur yang ber-KB tidak terpenuhi (UNMEETNEED)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah PUS (tak KB)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	Laporan F/ 1 Dal

Jabatan : Kabid Dalduk

Tugas :

- a. Merumuskan program kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;
- e. Melaksanakan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- h. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD Mandiri)}}{\text{Jumlah PPKBD Keseluruhan}} \times 100\%$	Jumlah Kader KB di desa atau PPKBD yang mandiri, yaitu menyuluh dan menggerakkan program KB dengan biaya mandiri	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

KABID KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Tugas :

- a. Merumuskan program kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;
- e. Melaksanakan pembinaan ketahanan remaja;
- f. Melaksanakan Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- g. Melaksanakan pembinaan dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang-bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang-bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Anggota BKB yang ber-KB	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Anggota BKB}}{\text{Jumlah PUS Anggota BKB}} \times 100\%$	Jumlah Peserta BKB Yang Aktif dalam pertemuan dan mengikuti program KB	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Persentase Anggota UPPKS yang ber-KB	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Anggota UPPKS}}{\text{Jumlah PUS Anggota BKB}} \times 100\%$	Jumlah Peserta UPPKS Yang Aktif dalam pertemuan dan mengikuti program KB	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Persentase Anggota BKR yang ber-KB	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Anggota BKR}}{\text{Jumlah PUS Anggota BKB}} \times 100\%$	Jumlah Peserta BKR Yang Aktif dalam pertemuan dan mengikuti program KB	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

Kasi Pembinaan Kesertaan KB

Tugas :

- a. Menyusun program kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan KB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan dinasny secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkann hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan dan pemetaan sasaran pembinaan program keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan untuk penyusunan strategi pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- g. Menyiapkan bahan untuk pemberian penghargaan kepada peserta KB lestari;
- h. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas kesertaan KB;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dan petunjuk operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada peserta KB, peningkatan partisipasi pria dan duta KB untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan kesertaan KB sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai ceminan penampilan kerja;
- m. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk pembinaan kelangsungan kesertaan KB;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Penyebarluasan Informasi KB/KR yang Efektif	Jumlah Penyebarluasan Informasi tentang Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

KASI DISTRIBUSI ALOKON

Tugas :

- a. Menyusun program kegiatan Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana penyediaan alat kontrasepsi;
- f. Menyiapkan tata laksana pengadministrasian, penyimpanan dan pengeluaran kontrasepsi agar diperoleh hasil kerja yang maksimal;
- g. Menyiapkan tata laksana sistem distribusi alat kontrasepsi;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi dan kepala sub bagian di lingkungan dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan distribusi alat kontrasepsi sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya Obat dan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Pasca Persalinan	Jumlah obat dan alat kontrasepsi yang terpenuhi	Jumlah Pemenuhan Obat dan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Pasca Persalinan	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Pendistribusian Alokon	Jumlah pendistribusian Alat Kontrasepsi	Jumlah Pendistribusian Operasional Alokon	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Pelayanan KB dan tersedianya Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Jumlah sarana pelayanan KB bagi keluarga miskin	Jumlah tersedianya Alat Kontrasepsi KB Bagi Keluarga Miskin	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

Kasi Pelayanan Keluarga Berencana

Tugas :

- a. Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan KB berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana yang meliputi pra pelayanan, pasca pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan;
- f. Menyiapkan bahan untuk penyediaan alat dan bahan pelayanan keluarga berencana;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana;
- h. Menyusun rencana segmentasi sasaran pelayanan keluarga berencana;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dan petunjuk operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengayoman peserta KB;
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi KB sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait demi kelancaran pelayanan keluarga berencana;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULA SI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah Cakupan Pelayanan Akseptor KB Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Pencapaian Pelayanan KB Medis Operasi	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Akseptor KB Yang Terlayani	Jumlah Pencapaian Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah Akseptor KB yang terlayani	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

KASI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA

Tugas :

- a. Menyusun program kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi di lingkungan dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- f. Menyiapkan bahan untuk pembinaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dan petunjuk operasional pembinaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- i. Melaksanakan koordinasi mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- k. Melaksanakan pemantayan, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Pelatihan Peningkatan Pendapatan Kelompok UPPKS	Jumlah Pencapaian Peningkatan Kinerja kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terpelihara dengan baik	Jumlah Tercapainya Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

Kasi Bina Ketahanan Remaja

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK/RM)	Jumlah sekolah dan instansi yang mendapatkan pembinaan tentang Kesehatan Reproduksi	Jumlah Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK/RM)	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah	Jumlah Kelompok atau Forum yang Mendapat Orientasi Konseling yang berada di luar sekolah	Jumlah Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasaran Pusat Pelayanan Informasi Konseling KRR (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Penyampaian Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan Informasi Konseling KRR (DAK)	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

Kasi Bina Ketahanan Keluarga

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah Kader Pengelola Bina Keluarga Remaja yang Mendapat Pembinaan	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Penyediaan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)	Jumlah Desa yang mendapat BKB Kit	Jumlah Terlaksananya Penyediaan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

Kasi Dalduk

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya forum untuk menelaah data bagi parameter kependudukan	Jumlah Buku Parameter Kependudukan yang dihasilkan	Jumlah Buku Parameter Kependudukan yang Dihasilkan dalam Menelaah Data Kependudukan	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Sosialisasi/Desiminasi Kebijakan dan Strategi Peranan Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan Dan Strategi Peranan Pengendalian	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan dan strategi peranan dalam pengendalian penduduk	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terbentuknya Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk	Jumlah kampung KB yang terbentuk	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

Kasi Data Dan Informasi

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Tercapainya Hasil Analisis Operasional Program KB dan Efek Dampak SPM Dan Hasil Pendataan	Jumlah Peserta yang mendapat Hasil analisis dan pendataan	Jumlah Peserta yang memahami Hasil Analisis Program KB dan Efek Dampak SPM dan Hasil Pendataan	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Sosialisasi Pelaporan dan Evaluasi Program KB	Jumlah Peserta Pelaporan dan Evaluasi Program KB	Jumlah Peserta yang mendapat Laporan dan Evaluasi Program KB	Laporan hasil pelaksanaan program dan bidang-bidang

Kasi Penyuluh Dan KIE

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Penyuluhan Tentang Kependudukan dan KB	Jumlah Kelompok yang mendapat penyuluhan	Jumlah kelompok yang mendapat penyuluhan serta memahami tentang kependudukan dan KB	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

Jabatan : Kasi Pendayagunaan PKB / PLKB dan IMP

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Learning Organization bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan Program KB	Jumlah Kader yang mendapat Pelatihan Pengelolaan Program KB	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya IMP dan Pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Jumlah Lomba kegiatan penilaian IMP dan Pengelola KB Terbaik tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Jumlah Lomba/Kegiatan Penilaian IMP dan Pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Peningkatan Kinerja Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat Operasional	Jumlah Kader yang Mendapat Operasional Peningkatan Kinerja IMP	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

KASI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Peningkatan Jaringan Mitra Kerja	Jumlah monitoring Kegiatan Momentum	Jumlah Kelompok atau Partner untuk Meningkatkan Jaringan Mitra Kerja	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terlaksananya Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kelompok Saka Kencana yang mendapat pembinaan	Jumlah Penyebarluasan Advokasi dan KIE terhadap Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

KASUBAG KEUANGAN

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Laporan keuangan yang tepat waktu	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
Terpenuhinya pelaporan dan evaluasi keuangan	Jumlah data kelengkapan SPP ke BKD	Data kelengkapan SPP ke BKD	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

Ka sub Bag Perencanaan

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersusunya dokumen perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi	Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Terpenuhinya pelayanan surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim / terdistribusi tepat waktu	Jumlah surat yang terdistribusi Jumlah surat masuk dan keluar	Agenda surat masuk dan keluar
Tertibnya arsip data kepegawaian	Jumlah evaluasi kehadiran apel pagi dan masuk dinas pegawai Dinas	Jumlah pelaksanaan evaluasi kehadiran apel pagi dan masuk dinas pegawai Dinas Jumlah kewajiban evaluasi dalam 1 tahun	Absensi single print Absensi manual
	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dan lengkap	Jumlah dokumen kepegawaian yang ter-update Jumlah pegawai Dinas	SIMPEG Data mutasi pegawai
	Jumlah laporan rutin kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian yang terkirim tepat waktu Jumlah kewajiban laporan kepegawaian dalam 1 tahun	SIMPEG Data mutasi pegawai
Terpenuhinya arsip data inventarisasi barang	Jumlah pemantauan kegiatan inventarisasi barang	Jumlah barang yang terinventarisasi Jumlah barang Dinas	DPA KIB KIR Pertanggungjawaban Pengadaan barang
	Jumlah laporan rutin barang	Jumlah laporan barang yang terkirim tepat waktu Jumlah kewajiban laporan barang 1 tahun	DPA KIB KIR
	Jumlah pemeliharaan barang inventaris	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris Jumlah barang yang perlu dipelihara/perawatan	DPA KIB

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	IDG (Index Pemberdayaan Gender)		
Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kabupaten Layak Anak	Jumlah indikator KLA tercapai	77
	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan/jumlah perempuan dan anak X 100%	74,52
	Keterwakilan perempuan dalam legislatif	Jumlah perempuan di legislatif	12
Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Prosentase peserta KB baru MKJP	Peserta KB aktif tahun lalu + peserta KB baru	8.37 Per 100.000
	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR	CPR = Jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang sedang berKB x 100	16.5
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Pra Ks, ks,ks1,ks2 X 100%	75.00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERANGKAT DAERAH DP3APPKB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	
	Menurunya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kabupaten Layak Anak	77
		Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	74,52
		Keterwakilan perempuan dalam legislatif	12
	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Prosentase peserta KB baru MKJP	8.37 per 100.000
		Angka pemakaian kontrasepsi / CPR	16,5
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	75,00

No	Nama keg	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1	Gaji dan Tunjangan	2.485.314.000
2	Tambahan penghasilan PNS (Kesejahteraan Pegawai)	1.400.000.000
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.885.314.000
	BELANJA LANGSUNG / KEGIATAN	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
3	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000
4	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	53.600.000
5	Penyediaan jasa kebersihan	10.000.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penanganan bangunan kantor	5.000.000
9	Penyediaan bahan logistik kantor	13.486.000
10	Penyediaan makanan dan minuman kegiatan	30.000.000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	161.800.000
12	Penyediaan jasa keamanan kantor	54.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
13	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	30.000.000
14	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	96.114.000
15	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	5.000.000
16	Penyusunan Laporan SKPD Bulanan dan Tahunan	10.000.000
17	Penyusunan Restra OPD	50.000.000
18	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	45.000.000
19	Peningkatan partisipasi pria dalam program KB	184.880.000
	ANGGARAN BOKB & DAK FISIK 2019	
20	Biaya operasional Keluarga Berencana (BOKB DAK)	4.502.517.000
21	Pengadaan KIE Kit (DAK)	150.000.000
22	Pengadaan Personal Komputer (DAK)	140.000.000
23	Pelayanan KIE	11.360.000

24	Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT	100.000.000
25	P. Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)	409.072.000
26	Pengadaan Genre KIT (DAK)	300.000.000
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan	
27	Operasional forum akan kabupaten	25.000.000
28	Sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan	10.000.000
29	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	15.000.000
30	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	15.000.000
31	Pengembangan dan pembinaan forum kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA) 3 Kelurahan / Desa dan pembinaan 1 x	30.000.000
	BIDANG DALDUK	
32	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	10.000.000
33	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	817.813.000
34	Pengelolaan data dan informasi KB	195.640.000
	BIDANG K-3	
35	Fasilitas pelaksanaan lomba-lomba urusan-urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	25.000.000
36	Kegiatan pembinaan organisasi	10.000.000
37	Orientasi dan bimtek pengelolaan PIK-KRR	40.000.000
38	Sosialisasi dan pembinaan tumbuh kembang anak	10.000.000
39	Peningkatan Pengembangan PPPAKB	650.000.000
40	Temu kader bina keluarga	20.000.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	8.275.282.000

				Operasional forum anak kabupaten							
				Sosialisasi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan							
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
				Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan							
				Pengembangan dan pembinaan forum kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA)							
			Kabupaten Layak Anak	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	10	10	12	14	16	20	22
				Operasional forum anak kabupaten							
				Sosialisasi Pemberdayaan dan							

			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	8.51 per 100.000	8.44 per 100.000	8.37 per 100.000	8.29 per 100.000	8.22 per 100.000	8.15 per 100.000	8.07 per 100.000
				Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan							
		Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Keterwakilan perempuan dalam legislatif	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	9	9	12	12	12	12	12
				Kegiatan pembinaan organisasi perempuan							
2	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Indek pembangunan manusia	Usia harapan hidup	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	77,31	77,31	77,32	77,57	77,82	78,37	78,82
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Temu Kader Bina Keluarga							
		a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Meningkatnya peserta KB baru	Program Keluarga Berencana	5	6	6,5	7	7,5	8	9

			MKJP	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin							
				Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB							
				Biaya Operasional Keluarga Berencana							
				Program pelayanan kontrasepsi							
				Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB							
			Angka pemakaian kontrasepsi / CPR	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	76,89	73,69	75,00	75,10	75,25	75,50	
				Operasional kelompok masyarakat peduli KB							
				Program pelayanan kontrasepsi							
				Pelayanan							

				pemasangan kontrasepsi KB							
				Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri							
				Operasional kelompok masyarakat peduli KB							
		b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	22,14	22,14	21,64	21,14	20,64	20,14	19,46
				Temu Kader Bina Keluarga							